

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peran adalah seorang pemain sandiwara (film), utama, perangkat tengah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹

Menurut Soekanto, Peran adalah proses dinamis kedudukan (status), yaitu dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap pegawainya.

Peran merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan pemahaman itu, dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan organisasi Pemuda Pancasila, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dari Ormas Pemuda Pancasila.

Pendekatan teori struktural fungsional menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.² General agreements ini memiliki daya yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, secara fungsional terintegrasi kedalam suatu bentuk ekuilibrium. Oleh sebab itu, aliran pemikiran tersebut disebut integration approach, order approach, equilibrium approach, atau structural-functional approach (fungsional struktural/fungsionalisme struktural).³

Teori ini menekankan keteraturan (orde) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu system sosial yang terdiri atas

¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 854

²I.B. Wirawan, *Teori-teori sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 41

³Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) h. 73

bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain.⁴

Menurut Merton, struktur yang ada dalam sistem sosial adalah realitas sosial yang dianggap otonom, dan merupakan organisasi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling tergantung. Dalam suatu sistem terdapat pola-pola perilaku yang relatif abadi. Struktur sosial dianalogikan dengan organisasi birokrasi modern, didalamnya terdapat pola kegiatan, hierarki, hubungan formal dan tujuan organisasi.

Pada posisi ini, Merton lebih banyak melihat hal-hal objektif dengan mengabaikan peristiwa-peristiwa yang subjektif. Merton mengkritik bahwa asumsi fungsionalisme cenderung konservatif dan lebih terpusat pada struktur sosial dari pada perubahan sosial. Ia menginginkan adanya keseimbangan fungsional. Merton menunjukkan bahwa struktur fungsional memberikan tekanan yang jelas pada orang-orang tertentu yang ada dalam masyarakat, sehingga mereka lebih menunjukkan kelakuan nonkonformis ketimbang konformis. Hal ini secara implicit memperlakukan individu sebagai pelaku yang memainkan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang sebelumnya, sesuai dengan norma atau aturan masyarakat individu yang tidak kreatif dalam aktivitasnya karena ia tidak independen. Merton lebih moderat karena ia menempatkan aktor sebagai entitas yang memiliki kebebasan yang luas untuk melakukan apa yang mereka inginkan dan tidak sekadar robot yang otomatis, struktur itu terintegrasi dan norma yang ada mengendalikan perilaku individu.⁵

2. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses yang berdimensi jamak (multidimensional), mencakup perubahan orientasi dan organisasi dari sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya.⁶

Suatu indikator keberhasilan pembangunan sebuah daerah bukan hanya terletak pada kemegahan gedung perkantoran, hotel-hotel berbintang, pasar swalayan atau dilihat dari mobilitas para pejabat yang hilir mudik ke luar negeri, yang kesemuanya itu nyaris tidak pernah dapat dinikmati oleh sebagian besar rakyatnya. Bukan Negara maju namanya jika berates-ratus hotel berbintang dibangun bukan untuk rakyatnya sendiri. Suatu organisasi juga tidak akan maju, apabila pengelolanya mulai dari tukang sapu sampai pucuk pimpinanya semua anggota keluarga; sementara anggota masyarakat yang lainnya yang membutuhkan fungsi dari organisasi tersebut hanya bisa menyaksikan dalam sikap pasrah.

⁴George Retzer, *Sociologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Terjemahan Alimanda)*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h.25

⁵I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 49-50

⁶Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 219

Sosialisasi sebagai pelopor ideologi pembangunan yang bersuara kerakyatan mempunyai pandangan otonom dalam menilai prestasi dan keterbatasannya sendiri.⁷

B. Kerangka Konsep

a. Sejarah Pemuda Pancasila

Pemuda Pancasila adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang anggotanya terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, tanpa membatasi latar belakang etnis, agama dan profesi. Organisasi ini berbasis pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, yang diharapkan melahirkan kader-kader Pemuda Pancasila yang berwawasan serta berpegang teguh pada nilai-nilai budaya bangsa dimasa kini dan dimasa akan datang.⁸

Sebagai sebuah organisasi, Pemuda Pancasila yang didirikan oleh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) pada tanggal 28 oktober 1959 di Jakarta oleh A. Yani, A.H. Nasution, Gatot Subroto, bertujuan untuk melawan partai komunis yang ingin merubah Indonesia menjadi faham komunis di Indonesia. Pada fase inilah karakter organisasi dan orientasi Pemuda Pancasila terbentuk. Manifestasi dari karakter organisasi dan orientasi ideologis tercermin dari sikap dan komitmen yang teguh untuk memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi negara.⁹

Pada mulanya Pemuda Pancasila bernama Pemuda Patriotik yang merupakan anak dari partai IPKI, yang berjuang mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara UUD 45 sebagai landasan ideology serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya mulailah IPKI membentuk barisan-barisan Pancasila seperti Pemuda Pancasila, Mahasiswa Pancasila, Tani Pancasila, Wanita Pancasila, Pelajar Pancasila dan Buruh Pancasila untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan dari komunis.

Dalam perjalanan waktu selanjutnya IPKI yang berstatus pertain ikut dalam pemilihan umum pada tahun 1971. Para kader Pemuda Pansila dihimbau untuk memberikan aspirasi polotiknya kepada pertain IPKI, namun usaha itu tidak mendapatkan hasil sama sekali di dalam parlemen. Maka IPKI bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973. Setelah bergabungnya IPKI ke

⁷Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2002) h. 209

⁸<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7136/1/08E00255.pdf>// diakses pada 23 juli 2012

⁹<http://pemudapancasila04.blogspot.com/2009/01/selayangpandangpemudapancasila.html>// diakses pada 21 maret 2013

Paartai Demokrasi Indonesia (PDI) maka organisasi Pemuda Pancasila menyatakan dirinya keluar dari IPKI, dan menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya (Golkar).¹⁰

Salah satu tokoh Pemuda Pancasila yang aktif dalam perpolitikan di Indonesia yaitu Ruhut Sitompul, dan menjadikan salah satu simpatisan Golkar. Selain aktif di Golkar, Ruhut juga menjadi pengurus aktif di berbagai organisasi seperti KNPI Dati I DKI Jaya, DPP Pemuda Panca Marga, DPP IKADIN, DPP Pemuda Pancasila. Saat ini, Ruhut adalah salah satu Ketua DPP Partai Demokrat, perannya dipartai pemerintah ini cukup penting. Hampir disetiap kasus selalu bersuara mewakili kepentingan partainya.¹¹ Ada juga Yoris Raweyay yang menduduki kursi parlemen dari Golongan Karya (Golkar). Namun tidak dapat dipungkiri jikalau mereka akan lebih mementingkan partai dari pada kepentingan organisasinya.

Pada tahun 1981 tokoh-tokoh Pemuda Pancasila dari Sumatera Utara seperti Amran YS, Hamril Ys, Faisal Abdullah, M L Tobing dan Efendi Nasution melakukan pertemuan di Ancol, dan akhirnya sepakat menunjuka Yapto Suryo Soemarno menjadi ketua umum menggantikan ML Tobing guna menyelenggarakan Musyawarah Besar Pemuda Pancasila.

Setelah diadakannya musyawarah bersama pada tahun 1981, akhirnya terpilih Yapto sebagai ketua umum Pemuda Pancasila di Cibubur, tujuan utamanya pada waktu itu adalah untuk menguatkan eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga Dekrit Presiden dengan visi dan misi membangun Indonesia yang kuat, kokoh, mandiri, sejatera, adil dan makmur Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, sekaligus membentuk kader bangsa, kader nasional dan pancasila.

Dengan tujuan memenuhi kebutuhan strategis dan faktual, maka Pemuda Pancasila merekrut anggotanya melalui semua golongan, seperti para sarjana masuk kedalam komponen sarjana Pancasila, mahasiswa masuk kedalam komponen mahasiswa Pancasila dan yang pelajar masuk di dalam pelajar Pancasila, bahkan yang wanita pun ikut masuk kedalam komponen wanita Pancasila. Namun pada umumnya anggota Pemuda Pancasila adalah orang-orang yang dirkrut dari penjaga keamanan bioskop, pasar-pasar dan parkir liar, karena citra awal Pemuda Pancasila menggunakan kekerasan didalam melakukan keinginannya.

Pemuda Pancasila harus siap menerima perubahan dan harus bisa melakukan perubahan didalam diri mereka sendiri, yang awal mulanya Pemuda Pancasila selalu melakukan tindakannya dengan cara repressif yang mengutamakan kekuatan fisik, harus diubah dengan mengutamakan pola pikir, ide-ide dan strategi untuk memberikan banyak manfaat didalam kehidupan bagi

¹⁰<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7136/1/08E00225.pdf>// situs ini diakses pada 23 juli 2012

¹¹<http://pushandaka.com/2010/02/ruhut-sitompul.html> diakses pada 23 juli 2012

masyarakat. dengan adanya perubahan ini, diharapkan Pemuda Pancasila dapat menghilangkan citra negative dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Pemuda Pancasila merasa bertanggung jawab dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, demi memajukan nama bangsa, Pemuda Pancasila Mendukung para kadernya yang menjadi anggota legislative di berbagai partai politik. Karena keperdulianya terhadap bangsa dan negara, Pemuda Pancasila melakukan kerjasama dengan pemerintah dan pengusaha untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran di Indonesia.¹²

b. Ideologi dan Tujuan Pemuda Pancasila

Ideologi berasal dari kata idea, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang artinya ilmu. Secara harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide – ide, atau ajaran tentang pengertian – pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, ide disama artikan dengan cita-cita. Cita-cita disama artikan sebagai hal yang telah ditetapkan dan harus tercapai, sehingga cita-cita bersifat tetap itu merupakan sekaligus dasar, pandangan atau paham.

Ideologi membentuk suatu system pemikiran yang secara normatif memberikan landasan yang dijadikan pedoman tingkah laku dalam mencapai cita-cita yang diterapkannya. Dengan demikian, ideology tidak hanya sekedar merupakan usaha saja, namun sekaligus mencakup hasil usahanya yang dapat dijadikan pedoman untuk bertindak dalam mencapai cita-cita. Secara substansia ideologi merupakan hasil usaha pemikiran atau kesadaran manusia.

Dalam uraian tersebut dapat ditemukan beberapa fungsi ideologi bagi suatu kelompok masyarakat atau bangsa, dalam masyarakat yang mengalami stagnasi, dimana irama hidup mencapai titik jenuh, ideologi sering dapat mengairahkan lagi hidup kelompok masyarakat atau bangsa untuk menyongsong situasi baru yang dipromosikan, Ideologi sebagai pedoman hidup bernegara dapat mempersatukan bangsa, memberikan rumusan situasi Negara dimasa lampau, masa kini dan dapat mengatur langkah-langkah strategi untuk mencapai situasi yang diinginkan. Ideologi memberikan aturan permainan bagi kehidupan politik dan masyarakat dalam usaha bersama mencapai kesejahteraan bangsa sebagai kesatuan yang kuat. Selalu memberikan arti pada masa lampau dan masa kini, ideology juga menunjukkan dunia baru yang akan dicapai bersama.

Dalam hal ini, sesuai dengan namanya “Pemuda Pancasila”, organisasi ini tidak hanya menempatkan Pancasila sebagai Ideologi bangsa semata, namun juga sebagai Ideologi dari

¹²http://pemudapancasila.or.id/?page_id=17 dikases pada 10 Desember 2012

organisasinya tersebut. Dimana organisasi ini menjadikan Pancasila sebagai acuan atau landasan peraturan-peraturan mereka dalam hal kegiatan-kegiatan ataupun kinerja yang ada di dalam organisasi tersebut.

Pemuda Pancasila memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tidak hanya itu, Pemuda Pancasila juga memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan berasaskan nilai-nilai Pancasila.

c. Model Kepemimpinan Pemuda Pancasila

Kepemimpinan diwujudkan melalui gaya kerja (operating style) atau cara bekerja sama dengan orang lain yang konsisten. Melalui apa yang telah diketikny (bahasa) dan apa yang diperbuatnya (tindakan), seseorang membantu orang-orang lainnya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Cara seseorang berbicara kepada yang lainnya dan cara seseorang bersikap di depan orang lain merupakan suatu gaya kerja.

Tujuan kepemimpinan, disisi lain adalah membantu orang untuk menegakkan kembali, mempertahankan dan meningkatkan motivasi mereka. Jadi pemimpin adalah orang yang membantu orang lain untuk memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Pemimpin bertindak dengan cara-cara yang mendorong produktivitas, moral tinggi, respons yang energik, kecakapan kerja yang berkualitas, komitmen, efisiensi, sedikit kelemahan, kepuasan, kehadiran dan kesinambungan dalam organisasi.

Dalam hal ini, organisasi Pemuda Pancasila menggunakan dasar-dasar Pancasila sebagai acuan dari peraturan-peraturan yang ada didalam organisasi tersebut. Dimana mereka sangat mementingkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya tanpa terkecuali. Tidak hanya itu, Pemuda Pancasila juga tidak pernah memandang ras, suku ataupun agama dalam pengkaderan anggota-anggotanya hingga dalam hal melakukan program amal sekalipun.¹³

Organisasi Pemuda Pancasila berasaskan oleh nilai-nilai Pancasila. Organisasi ini bertujuan untuk melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Organisasi Pemuda Pancasila berstatus independen. Ia bersifat terbuka tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan serta latar belakang sosial politik dan berbasis sosial kemasyarakatan. Organisasi ini juga bersifat mandiri, perjuangan/pergerakan yang militan, persaudaraan, patriotik, inovatif, kreatif dan kepemimpinan yang konsekuen.

¹³R. Wayne Pace dan Don F. Faules, *Komunikasi Organisasi* (Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) h. 276

d. Pengertian Organisasi Masyarakat

Organisasi kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹⁴

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meski Ormas juga dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI. Dalam melaksanakan kegiatannya Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba dan demokratis.¹⁵

e. Desa

Dalam sejarahnya, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Sejarah perkembangan desa-desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Negara Republik Indonesia.

Desa merupakan kesatuan masyarakat kecil seperti sebuah rumah tangga yang besar, yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau dihormati berdasarkan garis keturunan. Pola hubungan dan tingkat komunikasi pun masih sangat rendah, terutama di daerah pedesaan terpencil dan pedalaman.

Secara etimologi, kata “desa” berasal dari bahasa Sanskerta, *deshi* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.¹⁶ Oleh karena itu, ciri utama yang terletak pada desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal, tanah asal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relative kecil. Dengan kata lain, suatu desa ditandai oleh keterikatan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterikatan ini selain untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka.

Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.¹⁷

¹⁴Undang-Undang, No. 17 Tahun 2013 Pasal 1, Tentang Organisasi Kemasyarakatan

¹⁵Undang-Undang, No. 17 Tahun 2013 Pasal 2, 3 dan 4, Tentang Organisasi Kemasyarakatan

¹⁷Rustiadi dan Pranoto, *Agropolitan: Membangun Ekonomi Pedesaan*, (Bogor: Crestpent Pers, 2007) h. 33

¹⁸Adnon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), h. 4

f. Komponen Desa

Desa merupakan subsistem dari keseluruhan yang lebih luas yang dinamakan Negara. Desa sebagai suatu system memiliki komponen baik fisik, manusia, maupun kelembangan sosial.

Potensi adalah sebuah kemampuan dari desa yang memiliki nilai / harga. Potensi desa terdiri atas 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Potensi fisik yang meliputi, tanah air, iklim dan cuaca, flora dan fauna.
- 2) potensi non fisik, meliputi masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial desa dan aparatur desa, jika potensi dimanfaatkan dengan baik, desa akan berkembang dan desa akan memiliki fungsi, bagi daerah lain maupun bagi kota.

g. Klasifikasi Desa Menurut Tingkat Perkembangannya

- 1) Desa Swadaya, yaitu desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan cirri-ciri sebagai berikut:
 - a. Daerahnya terisolir dengan daerah tertentu.
 - b. Penduduknya jarang.
 - c. Mata pencaharian homogeny yang bersifat agraris.
 - d. Bersifat tertutup.
 - e. Masyarakat memegang teguh adat.
 - f. Teknologi masi rendah.
 - g. Sarana dan prasarana sangat kurang.
 - h. Hubungan antar manusia sangat erat.
 - i. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.
- 2) Desa Swakarya, adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menjadi desa swasembada, cirri-ciri desa swakarya adalah:

- a. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak terikat penuh.
 - b. Sudah mulai mempergunakan alat-alat teknologi.
 - c. Desa Swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian.
 - d. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan jalur lalu lintas dan prasarana lain.
 - e. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.
- 3) Desa Swasembada, adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional, cirri-ciri desa swasembada adalah:\
- a. Kebanyakan berlokasi di Ibukota Kecamatan.
 - b. Penduduknya padat-padat.
 - c. Tidak terikat dengan adat istiadat.
 - d. Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain
 - e. Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

h. Pembangunan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan masyarakat desa dan pembangunan desa merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda. Pembangunan desa dapat dikatakan sudah menjadi metode yang merupakan satu kebulatan, yang terdiri atas komponen-komponen yang satu sama lain yang saling berkaitan. Pembangunan masyarakat merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan menentukan harus dibangun utuh bersama-sama dengan lingkungan fisik dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian, apabila berbicara tentang pembangunan perdesaan, pada hakikatnya yang kita pikirkan adalah pembangunan masyarakat desa.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejatara dan berkeadilan.¹⁸

Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Sekitar 65% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi. Masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya secara bersama. Ada yang mengartikan pula bahwa pembangunan masyarakat desa adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial-ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.¹⁹

Pembangunan pedesaan bersifat multi dimensional dan multi aspek. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis atau pembahasan yang lebih terarah dan dalam konteks serba keterkaitan dengan bidang atau sektor dan aspek diluar pedesaan (fisik dan nonfisik, ekonomi dan nonekonomi, sosial-budaya, spasial dan non-spasial). Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kepedulian, kesediaan dan kemampuan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan didaerahnya.

C. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Partisipasi Pemuda Pancasila Dalam Membantu Pemerintah Menjaga Stabilitas Sosial Di Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Mulawarman yang bernama fey. Partisipasi Pemuda Pancasila dalam menjaga kestabilan sosial diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti keterlibatan dalam membantu aparat menjaga keamanan masyarakat,

¹⁸Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) h. 3

¹⁹*Ibid.* h. 15

penanggulangan bencana alam dan sebagainya. Pada penelitian ini, kesamaan atau hubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada objek penelitian yang sangat urgen, yaitu partisipasi ataupun peran dari Pemuda Pancasila dalam menjaga NKRI.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul). Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang bernama Sigit Nurdiyanto. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul terlihat aktif. Hal ini dapat dilihat dari adanya keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan pengembangan desa wisata. Atas dasar hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya penelitian ini juga memiliki hubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul “Perang Ketua Anak Cabang Pemuda Pancasila Dalam Mengembangkan Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang”. Dimana kesamaan tersebut memiliki objek kajian yaitu Desa, dengan urgen yang berbeda.

3. Pemuda Pancasila Dan Rezim Represif Orde Baru. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Abdul Arif. Pemuda Pancasila di era orde baru menjadi sebuah alat kekuatan pemerintah, dan melakukan kegiatan serta aksinya dengan cara represif maupun ideology namun lebih sering melakukannya dengan cara represif. Di akhir era orde baru, Pemuda Pancasila mulai merubah citra kekerasan di dalam ormasnya. Memasuki era reformasi, Pemuda Pancasila mulai menghilangkan citra negatif di dalam ormasnya, mereka mulai melakukan kegiatan sosial dan kemasyarakatan di Indonesia, namun pasca reformasi ini Pemuda Pancasila masih saja menunjukkan sifat represif didalam ormasnya dengan cara konflik-konflik antar ormas kepemudaan di berbagai wilayah di Indonesia. Atas dasar hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya penelitian ini juga memiliki hubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul “Perang Ketua Anak Cabang

Pemuda Pancasila Dalam Mengembangkan Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang”.

Dimana kesamaan tersebut memiliki objek kajian yaitu Desa, dengan urgen yang berbeda